

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, I. (2002). *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Akbari, A. (2014). *Polemik Penyusunan Rancangan KUHP: Kesehatan Berpikir terhadap Kodifikasi, Prinsip Lex Specialis, dan Klasifikasi Tindakan Pidana. Fiat Justitia Vol. 2.*
- Alkostar, A. (2000). *Dissenting Opinion, Concurring Opinion, dan Pertanggungjawaban Hakim.*
- Andrisman, T. (2011). *Buku Ajar Sistem Peradilan Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Cahyani, N., & Darmadi, A. (2019). *Konsep, "Menguasai" Dalam Tindak Pidana Narkotika (Study Kasus Putusan Nomor 222/Pid/2011/PT. PGD)*. Universitas Udayana.
- D, S. (1977). *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara.
- Deliarnoor, N., & Suseno, S. (2017). *Tindak Pidana Khusus*. Universitas Terbuka.
- Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Kencana.
- Fachri, F. (2023). *Ferdy Sambo Terbukti Pembunuhan Berencana Terhadap Yosua Hutabarat*. diakses 28 Juni 2024, dari Hukum Online.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/ferdy-sambo-terbukti-pembunuhan-berencana-terhadap-yosua-hutabarat-lt63ea4b7bf1074/>
- Fajar, M., & Yulianto, A. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunawan, A. (2018). *Tinjauan Yuridis Terhadap Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 105/Pid.Sus/2017/PN Mks)*. Universitas Hasanudin.
- Hamzah, A. (1994). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Harahap, Y. (2016). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, R. (2021). Menyoal Masuknya Pidana Khusus dalam RKUHP. diakses 28 Juni 2024, dari Hukum Online.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-masuknya-pidana-khusus-dalam-rkuhp-lt61c5855d58094>
- Hidayat, R. (2022). *Wamenkumham: Narkotika Kejahatan Unik*. diakses Mei 8, 2024, dari Hukum Online.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/wamenkumham--narkotika-kejahatan-unik-lt6215e277d1035/>
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses Juni 16, 2024, kbbi.web.id
- Kansil, C. (1984). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Krisnamukti, K. (2013). Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 1751/Pid.B/2012/PN.Jakarta Pusat. Tentang Penerapan Kekuatan Pembuktian Saksi Verbalisan yang dikaitkan dengan Prinsip Unus Testis Nullus Testis. *Skripsi* Universitas Padjajaran, Bandung.
- Laffranque, J. (2003). *Dissenting Opinion and Judicial Independence*, Vol. VIII.
- Lamintang, P. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Loeqman, L. (1990). *Delik-delik Politik*. Jakarta: Ind-Hill.
- Ludiyanto, A. (2023). Ibu Pembuang Bayi di Karangpandan Dijerat Pasal 308 KUHP. diakses 28 Juni 2024, dari Solopos: <https://soloraya.solopos.com/ibu-pembuang-bayi-di-karangpandan-dijerat-pasal-308-kuhp-1342172>

- Malau, Y. (2016). Penerapan Dissenting Opinion Dalam Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn.). Universitas Sumatera Utara.
- Manan, B. (2006). *Dissenting Opinion*. IKAHI.
- Marzuki, P. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moerad, P. (2005). Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana. Bandung: PT. Alumni.
- Prabowowati, Y. (2005). Dibalik Putusan Hakim: Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana. Jakarta: Citramedia.
- Prakoso, D., & Imunarso, A. (1987). Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP. Jakarta: Bina Aksara.
- Puspa, Y. (1977). Kamus Hukum. Semarang: Aneka Ilmu Hukum.
- Putusan Nomor 31/PUU-XV/2017
- Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad
- Rachmi, A., Pujiyono, H., Sari S. (2019). Keadilan Sosial Dalam Penyelenggaraan Klinik Kecantikan di Inonesia. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Rambe, N., Syahrin, A., & Mulyadi, M. (2022). Penerapan Pasal 112 dan 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN. Rap; 762/Pid.Sus/2017/PN Rap; 712/Pid.Sus/2017/PN Rap). *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Universitas Sumatra Utara.
- Rahrdjo, S. (2014). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Resnawardhani, F. (2019). Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 6 Issue 1.
- R, Y. (2005). Dibalik Putusan Hakim: Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana. Jakarta: Citramedia.
- Sasangka, H. (2003). Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

- Sodiki, A. (2014). *Dari Dissenting Opinion Menuju Living Constitution: Pemikiran Hukum Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH., Hakim Konstitusi Periode 2008-2013*. Universitas Brawijaya.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sujono, A., & Daniel, B. (2009). *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunarso, S. (2012). *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutiyoso, B., & Puspitasari, S. (2007). Dalam Antonius Sudirman, Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sutrisno, H. (1990). *Metodologi Research*. Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wijaya, S. (2007). *Pranata Dissenting Opinion Sebagai Instrumen Meningkatkan Tanggung Jawab Individual Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Universitas Sebelas Maret.
- Zuchdi, D. (1993). *Panduan Penelitian Analisis Konten*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).